

ABSTRAK

Perjanjian *franchise* menjadi salah satu sarana bisnis yang banyak digunakan di Indonesia karena menawarkan suatu perluasan usaha yang cepat dengan risiko yang lebih terukur. Perjanjian *franchise* pada praktiknya seringkali disusun sepihak oleh *franchisor*, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak. Hal ini, terdapat pada perjanjian *franchise* Es Teler 77 dan Kopi Nusantara X Sib-Sib *Premium Thai Iced Tea* bahwa adanya beberapa ketentuan kontrak yang menunjukkan dominasi *franchisor*, khususnya terkait hak dan kewajiban, standar operasional serta mekanisme pengakhiran perjanjian. Kondisi tersebut menyebabkan urgensi untuk menilai bagaimana asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik diterapkan dalam kedua perjanjian tersebut serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada *franchisee* sebagai pihak yang cenderung lebih lemah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teori yang digunakan meliputi Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak belum optimal karena ruang negosiasi *franchisee* terbatas, sementara asas itikad baik belum tercermin secara penuh dalam penyusunan klausul perjanjian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya penguatan pada perlindungan hukum yang lebih konkret melalui klausul yang proporsional, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil serta transparansi hak dan kewajiban agar perjanjian *franchise* memberikan keseimbangan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Perjanjian *Franchise*; Asas Kebebasan Berkontrak; Asas Itikad Baik; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Franchise agreements are widely utilized in Indonesia as a mechanism for business expansion with manageable risks. In practice, however such agreements are frequently drafted unilaterally by franchisors, resulting in an unequal bargaining position. This imbalance is reflected in the franchise agreements of Es Teler 77 and Kopi Nusantara X Sib-Sib Premium Thai Iced Tea, particularly in clauses governing rights and obligations, operational standards, and termination procedures. This research assesses the application of the principles of freedom of contract and good faith, as well as the extent of legal protection afforded to franchisee as the weaker party. Employing a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the study relies on primari, secondary, and tertiary legal materials that the principle of freedom of contract is not optimally implemented due to the limited negotiating power of franchisee, and the principle of good faith is not fully embodied in clause formulation. The study concludes that enhanced legal protection is required through more proportional contractual arrangements, transparent delineation of rights and obligations, and equitable dispute resolution mechanisms to ensure balanced legal relations within franchise agreements.

Keywords: *Franchise Agreement; Principle of Freedom of Contract; Principle of Good Faith; Legal Protection.*